

DOKUMEN TENDER /  
RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023



**JASA RAHARJA**

---

A member of **IFG**

TIM PENGADAAN  
TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023

## BAB I SYARAT UMUM DAN ADMINISTRASI

Rencana Kerja dan Syarat – syarat Pekerjaan ini terdiri dari bagian yang tersebut dibawah ini dan berlaku untuk pelaksanaan pengadaan Tenaga Penunjang tahun 2023.

### PASAL 1 KETENTUAN DAN ISTILAH

a. Dokumen Tender

Dokumen Tender terdiri dari :

1. Rencana Kerja dan Syarat (RKS), terdiri dari :
  - Syarat Umum & Administrasi
  - Ruang Lingkup Pekerjaan Spesifikasi Teknis
  - Metode Evaluasi Tender
  - Berita Acara Pemberian Penjelasan dan lampirannya
  - RAB / *Bill of Quantity*

b. Dokumen Kontrak Penyedia barang atau jasa, terdiri dari :

1. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
2. Dokumen Tender beserta berita acara penjelasan pekerjaan
3. Surat Penawaran dan lampirannya
4. Pakta Integritas
5. Copy Jaminan Pelaksanaan

Semua merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

c. Tim Pengadaan & Penyedia Barang atau Jasa.

1. Tim Pengadaan adalah sekumpulan orang yang ditugaskan untuk melaksanakan Tender Pengadaan Tenaga Penunjang tahun 2023.
2. Penyedia Barang atau Jasa ialah pihak yang akan diserahi tugas melaksanakan pengadaan seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Dokumen Tender ini.

### PASAL 2 PEMBERIAN PENJELASAN

a. Rapat Pemberian penjelasan diadakan pada :

Hari / tanggal : (akan disampaikan di kemudian hari)  
Jam : ... WIB  
Tempat di : PT Jasa Raharja Kantor Pusat

b. Pada saat pemberian penjelasan (Aanwijzing) harus dihadiri oleh Direktur Penyedia Barang atau Jasa, dalam hal tidak hadir dapat diwakilkan kepada Pejabat Perusahaan yang tercantum dalam struktur perusahaan dengan membawa Surat Tugas yang ditandatangani diatas kertas berkop perusahaan dan dicap serta dilampiri Foto Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP).

c. Dari hasil rapat pemberian penjelasan dan dilanjutkan dengan peninjauan dan penjelasan lapangan dibuatkan Berita Acara Penjelasan yang juga merupakan bagian dari Dokumen Tender.

Berita Acara Penjelasan ini ditanda tangani oleh seluruh Rekanan yang hadir.

- d. Penanda tangan Berita Acara Penjelasan pada :
- |                |   |                              |
|----------------|---|------------------------------|
| Hari / tanggal | : | sda                          |
| Jam            | : | ... WIB                      |
| Tempat di      | : | PT Jasa Raharja Kantor Pusat |

### **PASAL 3 TENDER**

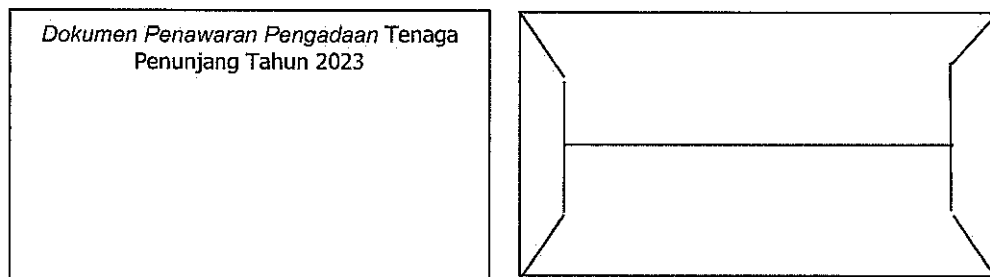
- a. Tender diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Raharja nomor KEP/34/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- b. Peserta Tender adalah Penyedia Barang atau Jasa yang merupakan Badan Hukum dan memenuhi Persyaratan sebagai berikut :
1. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir (jika ada)\*.
  2. NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)\*.
  3. NIB atau TDP yang masih berlaku \*.
  4. SIUP yang masih berlaku dengan Sub-Bidang Penyedia Jasa Tenaga Kerja / NIB yang masih berlaku dengan Sub-Bidang Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI.78200)/ Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI.78300)\*.
  5. SITU / NIB RBA / PKKPR / Keterangan Domisili Perusahaan / Izin Lokasi yang masih berlaku\*  
\* berdasarkan dokumen perusahaan yang telah diupload / update pada aplikasi Eprocurement PT Jasa Raharja. ( <https://eprocurement.jasaraharaja.co.id> )
- c. Peserta Tender yang mengajukan penawaran harus telah :
1. Mendaftar melalui aplikasi eProcurement PT Jasa Raharja ( <https://eprocurement.jasaraharaja.co.id> )
  2. Diundang oleh Tim Pengadaan.
  3. Mempelajari dan memahami semua Dokumen Tender.
  4. Mengikuti Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).
  5. Telah meninjau dan mengetahui keadaan dan lokasi pekerjaan.
  6. Mengetahui semua prosedur Tender.
- d. Pemasukan Penawaran akan diadakan pada :
- |                |   |                              |
|----------------|---|------------------------------|
| Hari / tanggal | : | sda                          |
| Jam            | : | ... WIB                      |
| Tempat di      | : | PT Jasa Raharja Kantor Pusat |

Sesaat setelah ditutupnya pemasukan surat penawaran, apabila terdapat calon penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran, maka pembukaan surat penawaran akan dilanjutkan.

- e. Penawaran yang datang setelah penutupan, ditolak dan dinyatakan gugur

**PASAL 4**  
**SURAT PENAWARAN DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran ditetapkan dengan sistem dua sampul.
2. Sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis yang disyaratkan dan pada sampul tertulis Data Administrasi & Teknis.
3. Sampul kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampul ditulis Data Harga Penawaran.
4. Sampul pertama dan sampul kedua dimasukan dalam satu sampul yaitu sampul penutup. Sampul penutup dimaksud dilem dan hanya dicantumkan tulisan : Dokumen Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023.
5. Contoh sampul penutup :



6. Surat Penawaran dan lampiran-lampirannya dibawa sendiri pada hari Tender dan dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan sebelum jam penutupan pada waktu Tender. Ada dua macam dokumen penawaran yaitu :
  1. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak / tempat penawaran bersama Surat Penawaran.
  2. Dokumen yang diserahkan kepada Panitia sebelum penutupan penawaran (Jaminan Penawaran Asli).
7. Surat Penawaran, harus dibuat di atas kertas berkop surat nama Perusahaan dan harus ditanda tangani Direksi Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa dengan menyebutkan nama terangnya.
8. Bilamana surat penawaran tidak ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa sendiri, harus dilampiri;
  1. Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa dengan materai secukupnya
  2. Satu eksemplar fotocopy dari akte pendirian perusahaan
9. Surat penawaran dibuat rangkap 1 (satu) rangkap lengkap dengan lampiran-lampirannya dan Surat Penawaran yang asli bermaterai dan materai harus diberi tanggal, terkena tanda tangan dan cap perusahaan. Surat penawaran termasuk lampiran-lampirannya dimasukkan kedalam sampul surat penawaran yang tertutup.

10. Yang dimasukkan kedalam kotak/tempat penawaran dalam sampul tertutup yaitu :

<b>SAMPUL PERTAMA</b>	<b>SAMPUL KEDUA</b>
<b>Administrasi</b>	
1. Akte Pendirian perusahaan dan Perubahan terakhir	1. Surat Penawaran
2. Copy NPWP & SK PKP	2. Lampiran rincian harga
3. Copy NIB atau TDP yang masih berlaku	
4. Copy SIUP yang masih berlaku dengan Sub-Bidang Penyedia Jasa Tenaga Kerja / NIB yang masih berlaku dengan Sub-Bidang Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI.78200)/ Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI.78300)	
5. SITU / NIB RBA / PKKPR / Keterangan Domisili / Izin Lokasi Perusahaan yang masih berlaku	
6. Laporan Keuangan Tahun 2021 (audited) Tahun 2022 (diutamakan audited), minimal terdiri dari Neraca Keuangan, Laporan Laba/Rugi, dan Cashflow	
7. Surat Pernyataan Perusahaan Tidak Pailit, Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Sedang Dihentikan & Direksi berwenang Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara (bermaterai).	
8. Surat Pernyataan Kebenaran Data Perusahaan (bermaterai).	
9. Copy Jaminan Penawaran	
<b>Teknis</b>	
1. Ruang lingkup pekerjaan dan data personil (minimal nama, jenis kelamin, umur, pendidikan) dengan melampirkan copy KTP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku, Surat Keterangan Bebas Narkoba yang masih berlaku, Curriculum Vitae (CV) dan persyaratan wajib pendukung beserta copy ijazah terakhir yang terinci masing-masing daerah serta Sertifikat Garda Pratama (khusus tenaga penunjang satuan pengamanan) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang	
2. Daftar jaringan kerja yang dimiliki perusahaan untuk wilayah seluruh Indonesia (dibuktikan dengan adanya Surat keputusan terkait struktur jaringan kerja di wilayah kerja Jasa Raharja (1 Kantor Pusat , 29 Kantor Cabang, 63 Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia) yang diterbitkan oleh Direktur Perusahaan)	

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

3. Daftar nama dan identitas koordinator di tiap jaringan kerja yang dimiliki perusahaan untuk wilayah Kantor Cabang Jasa Raharja seluruh Indonesia	
4. Daftar pengalaman perusahaan di bidang sejenis di IFG Group 3 (tiga) tahun terakhir (melampirkan copy kontrak)	
5. Dukungan Teknologi Informasi Sistem Pengelolaan Tenaga Penunjang	
6. Memiliki keahlian bidang pemadaman kebakaran dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan personal 1 (satu) tahun terakhir	
7. Pengalaman bekerja sama dengan PT Jasa Raharja (melampirkan copy kontrak)	
8. Pengalaman pekerjaan sejenis dengan total jangka waktu kontrak minimal 15 tahun (melampirkan copy kontrak)	

11. Surat asli Jaminan Penawaran harus dibawa untuk diserahkan kepada Tim Pengadaan pada saat pembukaan surat penawaran.
12. **Penyedia barang atau jasa diwajibkan upload dokumen penawaran berupa Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis & Dokumen Penawaran Harga yang telah di scan dengan bentuk file PDF ke Sistem eProcurement Jasa Raharja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.**
13. Bagi Penyedia barang atau jasa yang mengundurkan diri setelah memasukkan penawaran maka jaminan penawaran akan menjadi milik PT Jasa Raharja.
14. Surat penawaran harga harus bersifat lumpsum fixed price dan termasuk pajak-pajak yang menjadi kewajibannya.
15. Apabila harga penawaran yang tercantum dalam angka tidak sesuai dengan yang terbilang dalam huruf, maka yang dipakai adalah nilai yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
16. Surat penawaran harus diserahkan kepada Tim Pengadaan sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah mengisi daftar hadir.
17. Jaminan penawaran ditetapkan senilai 3% dari jumlah harga penawaran dari Bank Pemerintah / Swasta atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki program Surety Bond dan akan diberikan tanda terima oleh Tim Pengadaan.
  - **Jaminan penawaran ditujukan kepada Tim Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023**, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-2 Jakarta Selatan 12920, masa berlaku jaminan penawaran minimal selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
  - Jaminan penawaran tersebut akan dikembalikan setelah penyedia barang / jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dan kontrak ditandatangani.
  - Bagi penyedia barang / jasa yang menang dalam Tender ini, selanjutnya membuat Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus).
18. Surat Penawaran dianggap tidak sah dan batal apabila :
  - a) Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang / jasa yang tidak diundang dalam Tender ini.

- b) Tidak ditandatangani oleh peserta atau tidak distempel perusahaan yang bersangkutan (dalam hal kekurangan ini, dapat dipenuhi pada saat pembukaan Tender), namun apabila pada saat itu tidak dapat dipenuhi, maka penawaran ybs dinyatakan gugur.
- c) Tidak jelas besarnya jumlah penawaran baik dengan angka ataupun dengan huruf.
- d) Tidak mencantumkan jumlah penawaran dengan angka maupun dengan huruf.
- e) Tidak melakukan upload dokumen penawaran harga dalam *e-procurement*.
- f) Hadir dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran namun tidak melakukan Upload Dokumen Penawaran ke Sistem e-Procurement PT Jasa Raharja.

### **PASAL 5 PEMBUKAAN PENAWARAN**

1. Pembukaan penawaran dilakukan Tim Pengadaan pada waktu yang telah ditentukan
2. Keputusan sah atau tidaknya suatu penawaran berada ditangan Tim Pengadaan.
3. Atas pembukaan sampul dan penetapan sah atau tidaknya surat penawaran, harga-harga penawaran dan lain-lain peristiwa pada penyelenggaraan Tender dibuat berita acara pembukaan surat penawaran yang ditandatangani oleh Tim Pengadaan.
4. Berdasarkan evaluasi penawaran, Tim Pengadaan segera menetapkan nominasi calon pemenang dari peserta yang memasukkan penawaran yang paling menguntungkan, dalam arti penawaran secara teknis yang baik dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Dalam hal terdapat dua atau lebih penawaran dengan harga terendah sama dan secara teknis baik serta memiliki kecakapan dan kemampuan relatif sama, maka Tim Pengadaan meminta kepada peserta tersebut untuk mengajukan penawaran harga baru dan dituangkan dalam Berita Acara.

### **PASAL 6 HAK SANGGAH**

Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama dalam Pengadaan Sewa Tenaga Penunjang Tahun 2023, maka pihak yang kalah berhak mengajukan sanggahan dengan ketentuan :

1. Sanggahan hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan tender dengan prosedur atau tata cara Tender yang tercantum dalam dokumen tender.
2. Sanggahan akan dilayani apabila pihak penyanggah telah menyetorkan uang jaminan sanggahan sebesar nilai jaminan penawaran dan disertai bukti-bukti yang kuat kepada Tim Pengadaan.
3. Sanggahan harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sejak diumumkan pemenang.
4. Tim Pengadaan akan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
5. Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila

sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak Pemilik Pekerjaan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum.

### **PASAL 7 PENARIKAN DIRI**

1. Penarikan diri sebagai peserta hanya dapat dilakukan sebelum acara pembukaan surat penawaran dimulai.
2. **Penarikan diri setelah pembukaan surat penawaran mengakibatkan jaminan penawaran yang telah diserahkan menjadi milik PT Jasa Raharja.**
3. Dalam hal pemenang pertama mengundurkan diri, maka pemenang urutan kedua ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, demikian seterusnya kepada pemenang ketiga.
4. Apabila para pemenang yang ditunjuk tidak bersedia melaksanakan pekerjaan, maka jaminan penawaran para pemenang yang ditunjuk menjadi milik PT Jasa Raharja.

### **PASAL 8 TENDER ULANG**

Tender atas Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023 ini diulang, apabila terdapat kondisi sebagai berikut :

1. Jumlah calon peserta Tender yang mendaftar dan memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) peserta;
2. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran;
3. Jumlah Peserta pada tahap pembukaan penawaran kurang dari 2 (dua) peserta;
4. Hasil evaluasi Tim Pengadaan menunjukkan bahwa yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana yang ditentukan di dalam dokumen RKS kurang dari 2 (dua) peserta;
5. Tidak ada penawaran yang harga penawarannya di bawah atau sama dengan dana (nilai pagu) yang tersedia;
6. Terdapat sanggahan dari peserta Tender yang ternyata dapat dibuktikan kebenarannya;
7. Dalam evaluasi penawaran ditemukan indikasi atau bukti terjadinya persaingan tidak sehat;
8. Dalam pelaksanaan Tender terdapat indikasi atau bukti terjadinya pelanggaran atas prinsip dasar, etika dan/atau norma Pengadaan Barang dan Jasa; dan
9. Pemenang pertama, kedua dan seterusnya tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.
10. Tender atas Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023 ini dinyatakan batal dalam hal program kerja dimaksud tidak disetujui dalam anggaran perusahaan tahun 2023 dan peserta pengadaan tidak memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian.

### **PASAL 9 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

1. Tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja, apabila penyedia barang / jasa lalai dan tidak bertindak menurut ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau perintah dari PT Jasa Raharja, maka PT Jasa Raharja dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal ini :
  - a. Tanpa alasan yang dapat diterima menanggukhan atau menunda sama sekali



- pelaksanaan pengadaan sebelum selesai;
- b. Penyedia barang / jasa tidak dapat melanjutkan pengadaan dengan kesungguhan;
  - c. Penyedia barang / jasa menolak atau dengan tegas mengabaikan peringatan tertulis dari PT Jasa Raharja.
2. Tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja, apabila penyedia barang / jasa setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut atau dalam pelaksanaan selanjutnya melakukan kelalaian yang sama, maka PT Jasa Raharja tanpa mengurangi hak-hak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengulangan atau penerusan kelalaian dapat segera memutuskan surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan penyedia barang / jasa secara tertulis.

### **PASAL 10 TEMPAT PERADILAN**

- 1. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan, maka hal ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- 2. Bilamana dengan cara musyawarah belum juga diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili Pengadilan yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### **PASAL 11 PENYESUAIAN UPAH DAN HARGA**

Dalam pelaksanaan pengadaan ini fluktuasi upah, harga bahan atau komponen lainnya, resiko yang terjadi selama pengadaan Jasa Tenaga Penunjang Tahun 2023 tersebut, menjadi resiko penyedia barang / jasa kecuali terjadi perubahan Upah Minimum (UMP / UMK) yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, sedangkan jumlah pembayaran perbulan dapat berubah sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakan pada bulan yang bersangkutan.

### **PASAL 12 PERATURAN PEMBAYARAN**

Peraturan pembayaran untuk Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023 menggunakan sistem kontrak secara Lumpsum dan cara pembayarannya dapat melalui platform Pasar Digital (PaDi) UMKM atau akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.

### **PASAL 13 JAMINAN PELAKSANAAN**

Untuk mendapatkan jaminan bahwa Penyedia barang atau jasa akan memenuhi kewajiban-kewajibannya maka kepadanya diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan dalam bentuk Bank Garansi dari Bank Pemerintah / swasta atau dalam bentuk Surety Bond dari Asuransi Umum sebesar **5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan** untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa.

**PASAL 14  
JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

Jangka waktu pekerjaan dengan periode sewa 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.

**PASAL 15  
SANKSI DAN DENDA**

1. Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai pengadaan;
2. Keterlambatan dan tidak terpenuhinya prestasi atas penawaran yang diajukan oleh pemenang tender maka akan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti pengadaan berikutnya di PT Jasa Raharja selama 3 (tiga) tahun (*daftar hitam/blacklist*)

**PASAL 16  
PENYESUAIAN BIAYA**

Penyesuaian dapat dilakukan hanya untuk komponen UMP / UMK setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam hal biaya seragam dan persentase manajemen fee tidak dapat berubah.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN SPESIFIKASI TEKNIS

### RUANG LINGKUP DAN SPESIFIKASI

1. Deskripsi Pekerjaan

Pengadaan Jasa Penunjang Cleaning Service, Juru Layan, Juru Mudi, Satuan Pengamanan, Penjaga Malam, Operator Telepon, Resepsionis dan Mekanik ini meliputi:

a. Jumlah Kebutuhan Personil.

No	Uraian	Jumlah orang
1	<i>Cleaning Service</i>	24
2	Juru Layan	155
3	Juru Mudi	183
4	Satpam	177
5	Penjaga malam	114
6	Operator Telepon	1
7	Resepsionis	2
8	Mekanik	11
	<b>Jumlah</b>	<b>667</b>

b. Penempatan Personil  
Terlampir

c. Pengadaan Cleaning Service, Juru Layan, Juru Mudi, Satuan Pengamanan, Penjaga Malam, Operator Telepon, Resepsionis dan Mekanik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah termasuk komponen biaya sebagai berikut:

- 1) Gaji Dasar/Honor kepada tenaga kerja;
- 2) BPJS Tenaga Kerja;
- 3) BPJS Kesehatan;
- 4) Jaminan Pensiun;
- 5) Pemberian pakaian seragam kepada tenaga kerja meliputi:
  - a) Petugas Cleaning Service, Juru Layan, Juru Mudi, Satuan Pengamanan, Penjaga Malam, Operator Telepon, Resepsionis dan Mekanik dilengkapi pakaian, sepatu dan kartu identitas;
  - b) Pakaian dan perlengkapan Satuan Pengamanan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA;
- 6) Tunjangan;
- 7) Uang Makan yang pemberiannya diberikan sesuai dengan kehadiran per hari kerja;
- 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan jasa Cleaning Service;

- 9) Uang Kompensasi;
- 10) Tunjangan Hari Raya;
- 11) Biaya Akomodasi Penempatan;
- 12) Biaya Recruitment;
- 13) Biaya Manajemen Fee; dan
- 14) Pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

a. Cleaning Service

Lingkup dan spesifikasi jasa layanan cleaning service yang diberikan meliputi:

- 1) Pembersihan gedung kantor antara lain; lantai karpet & vinyl, dinding, kolam, saluran air, kaca gedung, plat dak lantai, plat dak / lantai atap gedung dan prasarana lainnya;
- 2) Pembersihan sarana gedung kantor antara lain; ruang kerja, koridor, basement, lobby, halaman, sarana olah raga, ruang lift lantai atap, ruang kerja mekanik, aula dan ruang lainnya;
- 3) Pembersihan perabot kantor dan mesin mesin kantor antara lain; meja kursi, mesin - mesin kantor, peralatan komputer, lemari, brankas, huruf dan logo, lampu hias, lampu halaman, lampu dalam ruangan, peralatan mekanik, karpet dan peralatan lainnya;
- 4) Penggantian sabun, parfum tissue dan perlengkapan toilet lainnya dilakukan tepat pada waktunya;
- 5) Khusus pembersihan lantai vinyl, karpet ruangan dan dinding marmer di lobby dan ruang lainnya yang menggunakan bahan sensitif agar dirawat secara terus menerus dan peralatan dan bahan yang berkualitas baik;
- 6) Khusus pembersihan kaca gedung petugas wajib mempunyai sertifikat bekerja di ketinggian dari instansi yang berwenang;
- 7) Pelaksanaan general cleaning setiap sebulan sekali dan dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan, namun sebelumnya harus mendapat ijin dari PIHAK PERTAMA;
- 8) Pelaksanaan seluruh pekerjaan dilakukan sebelum atau sesudah jam kantor yaitu mulai pukul 06.30 s/d 17.00 WIB setiap hari kerja. Namun selama jam kerja tenaga kerja yang ditugaskan dalam keadaan siap melaksanakan tugas yang berkaitan dengan jasa layanan cleaning service yang diberikan PIHAK PERTAMA;
- 9) Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang pada umumnya dilakukan oleh cleaning service;

Tenaga kerja yang ditugaskan sebagai cleaning service harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Memiliki daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja;
- 3) Berpendidikan SLTP sederajat;
- 4) Berusia antara 18 tahun sampai dengan 56 tahun;
- 5) Cakap, terampil, disiplin dan bertanggung jawab.

b. Juru Layan

Lingkup dan spesifikasi jasa juru layan yang diberikan oleh pelaksana pekerjaan meliputi menyiapkan dan menyajikan hidangan untuk karyawan, membersihkan dapur, handicraft dan perlengkapan dapur yang kotor serta mengantar surat, dokumen atau barang yang ditugaskan oleh unit kerja dan pekerjaan lainnya yang pada umumnya dilakukan oleh juru layan. Jam kerja

dimulai pukul 07.00 s/d 17.00 WIB setiap hari kerja, dan/atau dapat menyesuaikan jam kerja sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA;

Tenaga kerja yang ditugaskan sebagai cleaning service harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Memiliki daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja;
- 3) Berpendidikan SLTP sederajat;
- 4) Berusia antara 18 tahun sampai dengan 56 tahun;
- 5) Cakap, terampil, disiplin dan bertanggung jawab.

c. Juru Mudi

Lingkup dan spesifikasi jasa juru mudi yang diberikan oleh pelaksana pekerjaan meliputi pengecekan dan kontrol terhadap kondisi kendaraan sebelum dipergunakan, menyiapkan kendaraan sesuai tugas yang diperintahkan serta melakukan perawatan kendaraan secara berkala maupun perawatan rutin dengan baik dan pekerjaan pekerjaan lainnya yang pada umumnya dilakukan oleh juru mudi. Jam kerja dimulai pukul 07.00 s/d 17.00 WIB setiap hari kerja, dan / atau dapat menyesuaikan jam kerja sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA;

Tenaga kerja yang ditugaskan sebagai tenaga kerja juru mudi harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- 1) Memiliki identitas diri berupa kartu tanda penduduk;
- 2) Berpendidikan SLTA / sederajat;
- 3) Memiliki surat ijin mengemudi SIM A yang masih berlaku;
- 4) Mampu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat dengan baik;
- 5) Memiliki daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja;
- 6) Berusia antara 18 tahun sampai dengan 56 tahun;
- 7) Cakap, terampil, disiplin dan bertanggung jawab.

d. Satuan Pengamanan dan Penjaga Malam

Lingkup dan spesifikasi jasa satuan pengamanan dan penjaga malam yang diberikan oleh PIHAK KEDUA meliputi menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan kantor maupun rumah jabatan serta menjaga keamanan dan semua asset yang dimiliki PIHAK PERTAMA dengan baik dan pekerjaan pekerjaan lainnya yang pada umumnya dilakukan oleh satuan pengamanan dan penjaga malam. Jam kerja dimulai pukul 07.00 s/d 17.00 WIB setiap hari kerja, dan / atau dapat menyesuaikan jam kerja sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Tenaga kerja yang ditugaskan sebagai tenaga kerja jasa satuan pengamanan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- 1) Memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk
- 2) Memiliki daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja;
- 3) Berpendidikan SLTA sederajat
- 4) Memiliki surat ijin dari Polda, Polri atau Jasa Lembaga.
- 5) Berusia antara 18 tahun sampai dengan 56 tahun;
- 6) Cakap, terampil, disiplin dan bertanggung jawab.

Tenaga kerja yang ditugaskan sebagai tenaga kerja jasa penjaga malam harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut ;

- 1) Memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk
- 2) Memiliki daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja;

- 3) Berpendidikan SLTP atau SLTA sederajat.
- 4) Berusia antara 18 tahun sampai dengan 56 tahun;
- 5) Cakap, terampil, disiplin dan bertanggung jawab.

e. Operator Telepon

Lingkup dan spesifikasi jasa Operator Telepon yang diberikan oleh PIHAK KEDUA meliputi menerima telepon dengan ramah, mampu menyampaikan sambungan telepon yang masuk kepada orang yang dituju, memberikan informasi dan pekerjaan pekerjaan lainnya yang pada umumnya dilakukan oleh Operator Telepon. Jam kerja dimulai pukul 07.00 s/d 17.00 WIB setiap hari kerja, dan/ atau dapat menyesuaikan jam kerja sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Tenaga kerja yang ditugaskan sebagai Operator Telepon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Memiliki daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja;
- 3) Berpendidikan SLTA sederajat diutamakan yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris;
- 4) Berusia antara 18 tahun sampai dengan 40 tahun;
- 5) Cakap, terampil, disiplin dan bertanggung jawab;

f. Resepsionis

Lingkup dan spesifikasi jasa Resepsionis yang diberikan oleh PIHAK KEDUA meliputi menerima tamu perusahaan dengan ramah, melakukan pencatatan terhadap setiap tamu yang datang ke Perusahaan, memberikan informasi terhadap kebutuhan tamu yang datang untuk urusan perusahaan, dan pekerjaan pekerjaan lainnya yang pada umumnya dilakukan oleh Operator Telepon. Jam kerja dimulai pukul 07.00 s/d 17.00 WIB setiap hari kerja, dan/ atau dapat menyesuaikan jam kerja sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Tenaga kerja yang ditugaskan sebagai Operator Telepon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Memiliki daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja;
- 3) Berpendidikan SLTA sederajat diutamakan yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris;
- 4) Berusia antara 18 tahun sampai dengan 35 tahun;
- 5) Berpenampilan menarik, cakap, terampil, disiplin dan bertanggung jawab;

g. Mekanik

Lingkup dan spesifikasi jasa meknik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA meliputi melakukan pengecekan terhadap sarana dan infrastruktur bangunan baik gedung kantor maupun rumah jabatan Direksi dan rumah dinas, melakukan pengecekan genset gedung kantor dan panel SMDP dan LVMDP di ruang mekanik, perbaikan dan service terhadap kendala bidang elektrikal dan plumbing di gedung kantor maupun rumah jabatan serta membantu penyediaan dan pemasangan sound system untuk diklat perusahaan dan pekerjaan pekerjaan lainnya yang pada umumnya dilakukan oleh mekanik. Jam kerja dimulai pukul 07.00 s/d 17.00 WIB setiap hari kerja, dan/ atau dapat menyesuaikan jam kerja sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Tenaga kerja yang ditugaskan sebagai mekanik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Memiliki daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja;
- 3) Berpendidikan STM atau sederajat dengan jurusan mekanik / teknik;
- 4) Berusia antara 18 tahun sampai dengan 56 tahun;
- 5) Cakap, terampil, disiplin dan bertanggung jawab;
- 6) Memiliki pengalaman atau keterampilan di bidang mesin genset/ elektrikal/ sistem pendingin (AC);
- 7) Memiliki pengalaman atau keterampilan di bidang pertukangan dasar.

3. Durasi Kegiatan

Pengadaan Cleaning Service, Juru Layan, Juru Mudi, Satuan Pengamanan, Penjaga Malam, Operator Telepon, Resepsionis dan Mekanik ini dilaksanakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

4. Lokasi Kegiatan

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Lokasi Kantor PT Jasa Raharja.

## BAB III METODE EVALUASI TENDER

Metode Evaluasi Tender pekerjaan Tenaga Penunjang Tahun 2023 menggunakan Evaluasi Sistem **merit point** yaitu dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan urutan proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan evaluasi harga.

Sistem **merit point** menggunakan pendekatan atau metode kuantitatif, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran substansi isi dokumen penawaran dengan memberikan nilai (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

Urutan proses penilaian dengan sistem **merit point** adalah sebagai berikut :

### EVALUASI ADMINISTRASI

Setiap rekanan wajib menyampaikan persyaratan administrasi minimal terdiri dari:

1. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir (jika ada)\*.
  2. NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP)\*.
  3. NIB atau TDP yang masih berlaku \*.
  4. SIUP yang masih berlaku dengan Sub-Bidang Penyedia Jasa Tenaga Kerja / NIB yang masih berlaku dengan Sub-Bidang Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI.78200)/ Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI.78300)\*.
  5. SITU / NIB RBA / PKKPR / Keterangan Domisili Perusahaan / Izin Lokasi yang masih berlaku\*
  6. Laporan Keuangan Tahun 2021 (audited) dan Tahun 2022 (diutamakan audited), minimal terdiri Neraca Keuangan, Laporan Laba/Rugi, dan Cashflow.\*
  7. Surat Pernyataan Perusahaan Tidak Pailit, Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Sedang Dihentikan & Direksi berwenang Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara (bermaterai).
  8. Surat Pernyataan Kebenaran Data Perusahaan (bermaterai).
  9. Jaminan Penawaran (asli diserahkan kepada Tim Pengadaan)
- \* berdasarkan dokumen perusahaan yang telah diupload / update pada aplikasi Eprocurement PT Jasa Raharja. ( <https://eprocurement.jasaraharaja.co.id> )

Seluruh persyaratan tersebut diatas, wajib dipenuhi oleh peserta tender/ penyedia barang / jasa sebagai persyaratan untuk dapat diikuti sertakan pada tahapan evaluasi selanjutnya. Apabila penyedia barang / jasa tidak dapat melengkapi seluruh persyaratan administrasi tersebut diatas, maka penawaran dari penyedia barang / jasa tersebut tidak diikuti sertakan dalam evaluasi selanjutnya dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.



**EVALUASI KEMAMPUAN TEKNIS (BOBOT 70%)**

Evaluasi terhadap spesifikasi teknis hanya dilakukan terhadap penawaran dari penyedia barang dan jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (evaluasi administrasi). Adapun yang dinilai pada evaluasi spesifikasi teknis antara lain :

1. Ruang lingkup pekerjaan dan data personil (minimal nama, jenis kelamin, umur, pendidikan) dengan melampirkan copy KTP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku, Surat Keterangan Bebas Narkoba yang masih berlaku, Curriculum Vitae (CV) dan persyaratan wajib pendukung beserta copy ijazah terakhir yang terinci masing-masing daerah serta Sertifikat Gada Pratama (khusus tenaga penunjang satuan pengamanan) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.	15%
2. Daftar jaringan kerja yang dimiliki perusahaan untuk wilayah seluruh Indonesia (dibuktikan dengan adanya Surat keputusan terkait struktur jaringan kerja di wilayah kerja Jasa Raharja (1 Kantor Pusat , 29 Kantor Cabang, 63 Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia) yang diterbitkan oleh Direktur Perusahaan)	10%
3. Daftar nama dan identitas koordinator di tiap jaringan kerja yang dimiliki perusahaan untuk wilayah Kantor Cabang Jasa Raharja seluruh Indonesia	5%
4. Daftar pengalaman perusahaan di bidang sejenis di IFG Group 3 (tiga) tahun terakhir (melampirkan copy kontrak)	5%
5. Dukungan Teknologi Informasi Sistem Pengelolaan Tenaga Penunjang	30%
6. Tenaga Penunjang yang memiliki kemampuan bidang pemadaman kebakaran dibuktikan dengan adanya sertifikat dan/atau surat keterangan pelatihan personil yang dikeluarkan oleh instansi terkait minimal 1 (satu) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengumuman Tender	10%
7. Pengalaman bekerja sama dengan PT Jasa Raharja 3 (tiga) tahun terakhir (melampirkan copy kontrak)	20%
8. Pengalaman pekerjaan sejenis dengan total jangka waktu kontrak minimal 15 tahun (melampirkan copy kontrak)	5%

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

Kriteria penilaian sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>Ruang lingkup pekerjaan dan data personil (minimal nama, jenis kelamin, umur, pendidikan) dengan melampirkan copy KTP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku, Surat Keterangan Bebas Narkoba yang masih berlaku, Curriculum Vitae (CV) dan persyaratan wajib pendukung beserta copy ijazah terakhir yang terinci masing-masing daerah serta Sertifikat Gada Pratama (khusus tenaga penunjang satuan pengamanan) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Bobot 15%)</b>	BOBOT	NILAI
a.	Ada, Lengkap	100	15
b.	Ada, tidak lengkap	10	1.5
c.	Tidak ada	0	0
<b>2.</b>	<b>Daftar jaringan kerja yang dimiliki perusahaan untuk wilayah seluruh Indonesia (dibuktikan dengan adanya Surat keputusan terkait struktur jaringan kerja di wilayah kerja Jasa Raharja (1 Kantor Pusat, 29 Kantor Cabang, 63 Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia) yang diterbitkan oleh Direktur Perusahaan) (Bobot 10%)</b>	BOBOT	NILAI
a.	Ada	100	10
b.	Tidak ada / Tidak Lengkap	0	0
<b>3.</b>	<b>Daftar nama dan identitas koordinator di tiap jaringan kerja yang dimiliki perusahaan untuk wilayah Kantor Cabang Jasa Raharja seluruh Indonesia (dibuktikan dengan kartu tanda pengenal Perusahaan) (Bobot 5%)</b>	BOBOT	NILAI
a.	Ada	100	5
b.	Tidak ada / Tidak lengkap	0	0
<b>4.</b>	<b>Daftar pengalaman perusahaan di bidang sejenis di IFG Group 3 (tiga) tahun terakhir (melampirkan copy kontrak) (Bobot 5%)</b>	BOBOT	NILAI
a.	Ada, lebih dari 1 kontrak	100	5
b.	Ada, hanya ada 1 kontrak	10	0.5
c.	Tidak ada	0	0
<b>5.</b>	<b>Dukungan Teknologi Informasi Sistem Pengelolaan Tenaga Penunjang (Bobot 30%)</b>	BOBOT	NILAI
a.	Payroll Cashless, Absensi berbasis GPS dan Complain Handling (lengkap)	100	30
b.	Ada, tidak lengkap	10	3
c.	Tidak ada	0	0

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

<b>6.</b>	<b>Tenaga Penunjang yang memiliki kemampuan bidang pemadaman kebakaran dibuktikan dengan adanya sertifikat dan/atau surat keterangan pelatihan personil yang dikeluarkan oleh instansi terkait periode minimal 1 (satu) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengumuman Tender (Bobot 10%)</b>	BOBOT	NILAI
a.	Ada, $\geq$ 10% dari total kebutuhan personil	100	10
b.	Ada, < 10% dari total kebutuhan personil	10	1
c.	Tidak ada	0	0
<b>7.</b>	<b>Pengalaman bekerja sama dengan PT Jasa Raharja 3 (tiga) tahun terakhir (melampirkan copy kontrak) (bobot 20%)</b>	BOBOT	NILAI
a.	Ada, lebih dari 1 kontrak	100	20
b.	Ada, hanya 1 kontrak	10	2
c.	Tidak ada	0	0
<b>8.</b>	<b>Pengalaman pekerjaan sejenis dengan total jangka waktu kontrak minimal 15 tahun (melampirkan copy kontrak) (bobot 5%)</b>	BOBOT	NILAI
a.	$\geq$ 15 tahun	100	5
b.	< 15 tahun	0	0

Dalam Evaluasi Teknis Tim Pengadaan dimungkinkan melakukan survey terhadap kebenaran data yang telah disampaikan oleh Penyedia Barang dan Jasa langsung ke lokasi tanpa memberitahukan terlebih dahulu.

**EVALUASI HARGA PENAWARAN (BOBOT 30%)**

Evaluasi kewajaran harga penawaran dilakukan dengan membandingkan Harga Penawaran Peserta dengan HPS, namun tidak lebih tinggi dari HPS yang telah ditetapkan oleh Tim Pengadaan (Sub Bobot 50%). Apabila penawaran lebih rendah 20% dari HPS maka diberikan skor nol.

Evaluasi kerendahan harga penawaran dilakukan dengan membandingkan antara harga penawaran dari peserta pengadaan yang dinilai dengan harga penawaran yang paling rendah dari semua penawaran yang masuk dan memenuhi syarat administrasi serta teknis, namun tidak lebih tinggi dari HPS yang telah ditetapkan oleh Tim Pengadaan (Sub Bobot 50%). Apabila penawaran lebih rendah 20% dari HPS maka diberikan skor nol.

Demikian Dokumen Tender ini dibuat sebagai acuan dalam mengajukan penawaran tender Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023.

Tim Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023



Sigit Harismun  
Ketua Tim

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

*Lampiran Daftar Penempatan Tenaga Penunjang*

**DAFTAR PENEMPATAN TENAGA PENUNJANG**

NO	LOKET KANTOR	JURU MUDI	SATPAM	PENJAGA MALAM	JURU LAYAN	CLEANING SERVICE	MEKANIK	OPERATOR	RECEPTIONIST	TOTAL
1	Kantor Pusat Jakarta	26	49	10	16	21	8	1	2	133
	<b>SUBTOTAL KANTOR PUSAT</b>	<b>26</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>133</b>
2	Cabang DKI Jakarta	4	7	0	0	3	1	0	0	15
3	PERWAKILAN JAKARTA SELATAN	1	1	1	1	0	0	0	0	4
4	PERWAKILAN JAKARTA TIMUR	1	1	1	1	0	0	0	0	4
5	PERWAKILAN JAKARTA BARAT	1	1	1	1	0	0	0	0	4
6	KPJR JAKARTA UTARA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	<b>SUBTOTAL CABANG DKI JAKARTA</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
7	Cabang Jawa Barat - Bandung	5	6	1	6	0	0	0	0	18
8	PERWAKILAN CIREBON	1	0	1	1	0	0	0	0	3
9	PERWAKILAN TASIKMALAYA	1	1	1	1	0	0	0	0	4
10	PERWAKILAN SUKABUMI	1	1	1	2	0	0	0	0	5
11	PERWAKILAN PURWAKARTA	1	1	1	2	0	0	0	0	5
12	PERWAKILAN KARAWANG	1	1	1	1	0	0	0	0	4
13	PERWAKILAN BOGOR	1	1	1	2	0	0	0	0	5
14	PERWAKILAN BEKASI	1	1	1	1	0	0	0	0	4
15	PERWAKILAN INDRAMAYU	1	1	1	1	0	0	0	0	4
16	PERWAKILAN BANDUNG	1	0	0	1	0	0	0	0	2
17	KPJR BANDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KPJR CIMAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KPJR SUMEDANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KPJR PALIMANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KPJR GARUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KPJR CIANJUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	KPJR SUBANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KPJR CIBINONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	KPJR CIKARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG JABAR</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
26	Cabang Jawa Tengah - Semarang	3	8	0	5	0	1	0	0	17
27	PERWAKILAN SEMARANG	1	1	1	1	0	0	0	0	4
28	PERWAKILAN PURWOKERTO	1	1	1	1	0	0	0	0	4
29	PERWAKILAN PEKALONGAN	1	1	1	1	0	0	0	0	4
30	PERWAKILAN MAGELANG	1	1	1	1	0	0	0	0	4
31	PERWAKILAN SURAKARTA	1	1	1	1	0	0	0	0	4
32	PERWAKILAN SUKOHARJO	1	1	1	1	0	0	0	0	4
33	PERWAKILAN PATI	1	1	1	1	0	0	0	0	4
34	KPJR TK.I DEMAK	1	0	0	1	0	0	0	0	2
35	KPJR TK.II UNGARAN	0	0	1	0	0	0	0	0	1
36	KPJR TK.II BLORA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
37	KPJR TK.I TEGAL	2	0	1	0	0	0	0	0	3
38	KPJR TK.I WANGON	1	0	1	0	0	0	0	0	2
39	KPJR TK.I KEBUMEN	0	0	1	0	0	0	0	0	1
40	KPJR TK.II SRAGEN	0	0	1	0	0	0	0	0	1
41	KPJR TK.I KLATEN	1	0	1	0	0	0	0	0	2
42	KPJR TK.II JEPARA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	<b>SUBTOTAL CABANG JATENG</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
43	Cabang Jawa Timur - Surabaya	5	7	1	5	0	1	0	0	19
44	PERWAKILAN SURABAYA	1	0	0	1	0	0	0	0	2
45	PERWAKILAN MALANG	1	0	2	1	0	0	0	0	4
46	PERWAKILAN JEMBER	0	0	2	1	0	0	0	0	3
47	PERWAKILAN KEDIRI	1	0	3	1	0	0	0	0	5
48	PERWAKILAN MADIUN	1	0	3	1	0	0	0	0	5
49	PERWAKILAN BOJONEGORO	1	0	2	1	0	0	0	0	4
50	PERWAKILAN PAMEKASAN	1	0	1	1	0	0	0	0	3
51	PERWAKILAN PROBOLINGGO	1	0	1	1	0	0	0	0	3
52	KPJR TK.I MOJOKERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	KPJR TK.I BANYUWANGI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
54	KPJR TK.I TULUNGAGUNG	1	0	0	0	0	0	0	0	1
55	KPJR TK.I TUBAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
56	KPJR TK.I SIDOARJO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
57	KPJR TK.II KEPANJEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	KPJR TK.II NGANJUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	KPJR TK.II NGAWI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	KPJR TK.II PONOROGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	KPJR TK.II BANGKALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG JATIM</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
62	Cabang Sumut - Medan	4	8	4	5	0	0	0	0	21
63	PERWAKILAN PADANG SIDEMPUAN	1	0	1	1	0	0	0	0	3
64	PERWAKILAN PEMATANG SIANTAR	1	0	1	1	0	0	0	0	3
65	PERWAKILAN KISARAN	1	0	1	1	0	0	0	0	3
66	PERWAKILAN KABANJAHE	1	0	1	1	0	0	0	0	3
67	PERWAKILAN TEBING TINGGI	1	0	1	1	0	0	0	0	3
68	PERWAKILAN MEDAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	<b>SUBTOTAL CABANG SUMUT</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

69	Cabang Bali - Denpasar	4	5	1	3	0	0	0	0	13
70	PERWAKILAN SINGARAJA	1	0	0	1	0	0	0	0	2
71	KPJR NEGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	KPJR GIANYAR	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	<b>SUBTOTAL CABANG BALI</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
73	Cabang Aceh - Banda Aceh	3	6	0	2	0	0	0	0	11
74	PERWAKILAN LANGSA	1	2	0	1	0	0	0	0	4
75	PERWAKILAN LHOKSEUMAWE	1	2	0	1	0	0	0	0	4
76	PERWAKILAN MEULABOH	1	1	1	1	0	0	0	0	4
77	KPJR Tk. II SIGLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	KPJR Tk. II BIREUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG N.A.D.</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
79	Cabang Sumbar - Padang	4	3	0	2	0	0	0	0	9
80	PERWAKILAN BUKITTINGGI	1	0	1	1	0	0	0	0	3
81	PERWAKILAN SOLOK	1	0	1	1	0	0	0	0	3
	<b>SUBTOTAL CABANG SUMBAR</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
82	Cabang Sumsel - Palembang	3	3	1	2	0	0	0	0	9
83	PERWAKILAN LAHAT	1	0	1	1	0	0	0	0	3
84	PERWAKILAN BATURAJA	1	0	0	1	0	0	0	0	2
85	KPJR Tk. II PANGKALAN BALAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	KPJR Tk. II INDRALAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	KPJR Tk. II LUBUK LINGGAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG SUMSEL</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
88	Cabang Sulsel - Makassar	6	3	0	3	0	0	0	0	12
89	PERWAKILAN PAREPARE	1	0	1	1	0	0	0	0	3
90	PERWAKILAN WATAMPONE	1	0	1	1	0	0	0	0	3
91	PERWAKILAN PALOPO	1	0	1	1	0	0	0	0	3
92	KPJR Tk. II MAMUJU	0	0	1	0	0	0	0	0	1
93	KPJR Tk. II BANTAENG	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	<b>SUBTOTAL CABANG SULSEL</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
94	Cabang Sulut - Manado	3	2	2	2	0	0	0	0	9
95	PERWAKILAN KOTAMUBAGU	1	1	1	0	0	0	0	0	3
96	PERWAKILAN GORONTALO	1	1	1	1	0	0	0	0	4
97	PERWAKILAN TERNATE	1	1	1	1	0	0	0	0	4
	<b>SUBTOTAL CABANG SULUT</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
98	Cabang Kalsel - Banjarmasin	2	1	1	2	0	0	0	0	6
99	PERWAKILAN KANDANGAN	1	1	1	1	0	0	0	0	4
100	KPJR Tk. II BATU LICIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG KALSEL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
101	Cabang Kalbar - Pontianak	2	4	3	2	0	0	0	0	11
102	PERWAKILAN SINGKAWANG	0	0	1	1	0	0	0	0	2
103	PERWAKILAN SINTANG	1	0	1	1	0	0	0	0	3
104	KPJR Tk. II MEMPAWAH	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	<b>SUBTOTAL CABANG KALBAR</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
105	Cabang Lampung - Bandar Lampung	3	3	1	2	0	0	0	0	9
106	PERWAKILAN METRO	1	0	1	1	0	0	0	0	3
107	PERWAKILAN KOTABUMI	1	0	1	1	0	0	0	0	3
108	KPJR Tk. II PRINGSEWU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	KPJR Tk. II KALIANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG LAMPUNG</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
110	Cabang Riau - Pekanbaru	3	3	1	2	0	0	0	0	9
111	PERWAKILAN DUMAI	1	0	1	1	0	0	0	0	3
112	KPJR Tk. II RENGAT	0	0	1	0	0	0	0	0	1
113	KPJR Tk. II DURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG RIAU</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
114	Cabang DI. Yogyakarta - Yogyakarta	4	3	1	2	0	0	0	0	10
	KANTOR PELAYANAN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
115	KPJR Tk. I BANTUL	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	<b>SUBTOTAL CABANG DIY</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
116	Cabang Maluku - Ambon	2	2	0	2	0	0	0	0	6
	<b>SUBTOTAL CABANG MALUKU</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
117	Cabang Kaltim - Balikpapan	3	3	0	2	0	0	0	0	8
118	PERWAKILAN SAMARINDA	1	0	1	1	0	0	0	0	3
119	PERWAKILAN TARAKAN	1	0	1	1	0	0	0	0	3
120	KPJR Tk. II TANJUNG SELOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Korwilwas IV BALIKPAPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG KALTIM</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
122	Cabang Papua - Jayapura	3	2	2	2	0	0	0	0	9
123	PERWAKILAN MANOKWARI	1	0	2	1	0	0	0	0	4
124	KPJR Tk. II MERAUKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	KPJR Tk. II SORONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG PAPUA</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
126	Cabang Jambi - Jambi	2	2	2	2	0	0	0	0	8
127	PERWAKILAN MUARA BUNGO	1	1	1	1	0	0	0	0	4
128	KPJR Tk. II SENGETI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG JAMBI</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
129	Cabang Bengkulu - Bengkulu	2	3	1	2	0	0	0	0	8
	<b>SUBTOTAL CABANG BENGKULU</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
130	Cabang NTT - Kupang	2	1	2	2	0	0	0	0	7
131	PERWAKILAN ENDE	1	1	1	1	0	0	0	0	4
132	KPJR Tk. II BELU ATAMBUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG NTT</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
133	Cabang NTB - Mataram	2	2	1	2	0	0	0	0	7
134	PERWAKILAN BIMA	1	0	1	1	0	0	0	0	3
135	PERWAKILAN SUMBAWA	1	0	1	1	0	0	0	0	3
136	KPJR Tk. II SELONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG NTB</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
137	Cabang Sulteng - Palu	2	2	1	2	0	0	0	0	7
	<b>SUBTOTAL CABANG SULTENG</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
138	Cabang Sultra - Kendari	2	2	1	2	0	0	0	0	7
	<b>SUBTOTAL CABANG SULTRA</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
139	Cabang Kalteng - Palangkaraya	2	2	1	2	0	0	0	0	7
140	KPJR Tk. II SAMPIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL CABANG KALTENG</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
141	Cabang Banten - Banten	3	3	1	2	0	0	0	0	9
142	PERWAKILAN TANGERANG	1	0	0	0	0	0	0	0	1
143	KPJR Tk. II TIGARAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	KPJR Tk. II PANDEGLANG	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	<b>SUBTOTAL CABANG BANTEN</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
145	Cabang Kepri - Batam	2	2	1	2	0	0	0	0	7
146	PERWAKILAN TANJUNG PINANG	1	0	1	1	0	0	0	0	3
	<b>SUBTOTAL CABANG KEPRI</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
147	Cabang Babel - Tanjung Pandan	2	2	1	2	0	0	0	0	7
	<b>SUBTOTAL CABANG BABEL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>188</b>	<b>177</b>	<b>114</b>	<b>155</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>667</b>

Lampiran contoh surat penawaran

## KOP SURAT PERUSAHAAN

No. : .....  
Hal : Penawaran  
Lamp. : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
Tim Tenaga Penunjang Tahun 2023  
PT Jasa Raharja

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....

Sebagai Direktur/Kuasa\*) sesuai akte pendirian PT/CV .....No.....  
Tanggal....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
NPWP : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah mempelajari dan memahami segala isi dari Dokumen Tender dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Tenaga Penunjang Tahun 2023, yang rapat penjelasannya diadakan pada:

Hari / Tanggal : ..... 2023  
Jam : ..... WIB  
Tempat : .....

2. Mengajukan penawaran harga satuan tetap untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp. .... (termasuk pajak-pajak yang terkait). Terbilang : .....
3. Menyerahkan Jaminan Penawaran sebesar Rp. ....(.....) sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
4. Akan tunduk pada ketentuan / peraturan Tender yang berlaku serta lampiran - lampiran tanpa kecuali dan segala syarat-syarat yang telah ditentuka Tim Pengadaan sehubungan dengan pekerjaan ini.

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

---

....., .....2023

PT/CV .....

*Tandatangan  
Materai 10000  
Tanggal dan Cap Perusahaan*

.....  
Direktur

*Lampiran contoh Bill of Quantity*

**BILL OF QUANTITY  
REKAPITULASI PENGADAAN JASA TENAGA PENUNJANG CLEANING SERVICE,  
JURU LAYAN, JURU MUDI, SATUAN PENGAMANAN, PENJAGA MALAM,  
OPERATOR TELEPON, RESEPSIONIS DAN MEKANIK TAHUN 2023**

No.	Jenis Tenaga Penunjang	Biaya (Rp)
<b>I</b>	<b>Pemeliharaan</b>	
a	Cleaning Service	...
b	Juru Layan	...
c	Operator	...
d	Mekanik	...
e	Resepsionis	...
f	THR	...
g	Kompensasi	...
<b>Sub Total I</b>		...
<b>II</b>	<b>Transportasi dan Kendaraan</b>	
a	Juru Mudi	...
b	THR	...
c	Kompensasi	...
<b>Sub Total II</b>		...
<b>III</b>	<b>Keamanan</b>	
a	Satuan Pengamanan	...
b	Penjaga Malam	...
c	THR	...
d	Kompensasi	...
<b>Sub Total III</b>		...
<b>IV</b>	<b>Uang Makan per Hari</b>	...
<b>Total Biaya</b>		...
Terbilang :		
Keterangan : 1 Kertas Kerja terlampir 2 Total Biaya sudah memperhitungkan PPN 11%		Jakarta,    September 2023 PT / CV ...  Nama Pimpinan Jabatan



**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

**BILL OF QUANTITY BIAYA TENAGA CLEANING SERVICE TAHUN 2023**

No.	Cabang	Komponen Biaya							Manajemen Fee	Jumlah Biaya	PPN 11%	Jumlah Total Perorang
		UMP 2023	Astek	Askes	J.Pensiun	Seragam	Total Biaya					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		(Ax4,89%)	(Ax5%)	(Ax2%)		(SUM A;E)	(F x.%Mg Fee)	(F+G)	(Gx11%)	(H+I)		
1	Kantor Pusat	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.569.622	-	-	-		
2	DKI Jakarta	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.569.622	-	-	-		
	<b>Jumlah</b>	9.803.596	479.396	490.180	196.072	170.000	11.139.244	-	-	-		

**BILL OF QUANTITY BIAYA TENAGA JURU LAYAN TAHUN 2023**

No.	Cabang	Komponen Biaya				Seragam	Total Biaya F (SUM A;E)	Manajemen Fee G (F x.%.Mg Fee)	Jumlah Biaya H (F+G)	PPN 11% I (Gx11%)	Jumlah Total Perorang J (H+I)
		UMP 2023 A	BPJS AsteK B (Ax4,89%)	BPJS Askes C (Ax5%)	J.Pensiun D (Ax2%)						
1	Kantor Pusat	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.569.622	-	-	-	
2	DKI Jakarta	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.569.622	-	-	-	
3	Jawa Barat	5.176.179	253.115	258.809	103.524	85.000	5.876.627	-	-	-	
4	Jawa Tengah	3.060.348	149.651	153.017	61.207	85.000	3.509.223	-	-	-	
5	Jawa Timur	4.525.479	221.296	226.274	90.510	85.000	5.148.558	-	-	-	
6	Sumatra Utara	3.624.117	177.219	181.206	72.482	85.000	4.140.025	-	-	-	
7	Bali	3.163.837	154.712	158.192	63.277	85.000	3.625.017	-	-	-	
8	Aceh	3.540.555	173.133	177.028	70.811	85.000	4.046.527	-	-	-	
9	Sumatra Barat	2.742.476	134.107	137.124	54.850	85.000	3.153.556	-	-	-	
10	Sumatra Selatan	3.541.082	173.159	177.054	70.822	85.000	4.047.117	-	-	-	
11	Sulawesi Selatan	3.523.181	172.284	176.159	70.464	85.000	4.027.087	-	-	-	
12	Sulawesi Utara	3.530.000	172.617	176.500	70.600	85.000	4.034.717	-	-	-	
13	Kalimantan Selatan	3.293.371	161.046	164.669	65.867	85.000	3.769.953	-	-	-	
14	Kalimantan Barat	3.085.615	150.887	154.281	61.712	85.000	3.537.495	-	-	-	
15	Lampung	2.991.349	146.277	149.567	59.827	85.000	3.432.020	-	-	-	
16	Riau	3.723.278	182.068	186.164	74.466	85.000	4.250.976	-	-	-	
17	DI Yogyakarta	2.324.775	113.681	116.239	46.496	85.000	2.686.191	-	-	-	
18	Maluku	2.812.827	137.547	140.641	56.257	85.000	3.232.272	-	-	-	
19	Kalimantan Timur	4.055.356	198.307	202.768	81.107	85.000	4.622.538	-	-	-	
20	Papua	3.864.696	188.984	193.235	77.294	85.000	4.409.208	-	-	-	
21	Jambi	3.230.207	157.957	161.510	64.604	85.000	3.699.279	-	-	-	
22	Bengkulu	2.601.802	127.228	130.090	52.036	85.000	2.996.156	-	-	-	
23	Nusa Tenggara Timur	2.187.506	106.969	109.375	43.750	85.000	2.532.600	-	-	-	
24	Nusa Tenggara Barat	2.598.079	127.046	129.904	51.962	85.000	2.991.991	-	-	-	
25	Sulawesi Tengah	3.359.224	164.266	167.961	67.184	85.000	3.843.636	-	-	-	
26	Sulawesi Tenggara	2.993.730	146.393	149.687	59.875	85.000	3.434.684	-	-	-	
27	Kalimantan Tengah	3.595.013	175.796	179.751	71.900	85.000	4.107.460	-	-	-	
28	Banten	4.657.222	227.738	232.861	93.144	85.000	5.295.966	-	-	-	
29	Kepulauan Riau	4.500.440	220.072	225.022	90.009	85.000	5.120.542	-	-	-	
30	Bangka Belitung	3.498.479	171.076	174.924	69.970	85.000	3.999.448	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	105.603.819	5.164.027	5.280.191	2.112.076	2.550.000	120.710.113	-	-	-	

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

**BILL OF QUANTITY BIAYA TENAGA JURU MUDI TAHUN 2023**

No.	Cabang	Komponen Biaya				Seragam	Total Biaya F (SUM A:E)	Manajemen Fee G (F x.%Mg Fee)	Jumlah Biaya H (F+G)	PPN 11% I (Gx11%)	Jumlah Total Perorang J (H+I)
		UMP 2023 A	BPJS Astek B (Ax4,99%)	BPJS Askes C (Ax5%)	J.Pensiun D (Ax2%)						
1	Kantor Pusat	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.569.622	-	-	-	
2	DKI Jakarta	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.569.622	-	-	-	
3	Jawa Barat	5.176.179	253.115	258.809	103.524	85.000	5.876.627	-	-	-	
4	Jawa Tengah	3.060.348	149.651	153.017	61.207	85.000	3.509.223	-	-	-	
5	Jawa Timur	4.525.479	221.296	226.274	90.510	85.000	5.148.558	-	-	-	
6	Sumatra Utara	3.624.117	177.219	181.206	72.482	85.000	4.140.025	-	-	-	
7	Bali	3.163.837	154.712	158.192	63.277	85.000	3.625.017	-	-	-	
8	Aceh	3.540.555	173.133	177.028	70.811	85.000	4.046.527	-	-	-	
9	Sumatra Barat	2.742.476	134.107	137.124	54.850	85.000	3.153.556	-	-	-	
10	Sumatra Selatan	3.541.082	173.159	177.054	70.822	85.000	4.047.117	-	-	-	
11	Sulawesi Selatan	3.523.181	172.284	176.159	70.464	85.000	4.027.087	-	-	-	
12	Sulawesi Utara	3.530.000	172.617	176.500	70.600	85.000	4.034.717	-	-	-	
13	Kalimantan Selatan	3.293.371	161.046	164.669	65.867	85.000	3.769.953	-	-	-	
14	Kalimantan Barat	3.085.615	150.887	154.281	61.712	85.000	3.537.495	-	-	-	
15	Lampung	2.991.349	146.277	149.567	59.827	85.000	3.432.020	-	-	-	
16	Riau	3.723.278	182.068	186.164	74.466	85.000	4.250.976	-	-	-	
17	D I Yogyakarta	2.324.775	113.681	116.239	46.496	85.000	2.686.191	-	-	-	
18	Maluku	2.812.827	137.547	140.641	56.257	85.000	3.232.272	-	-	-	
19	Kalimantan Timur	4.055.356	198.307	202.768	81.107	85.000	4.622.538	-	-	-	
20	Papua	3.864.696	188.984	193.235	77.294	85.000	4.409.208	-	-	-	
21	Jambi	3.230.207	157.957	161.510	64.604	85.000	3.699.279	-	-	-	
22	Bengkulu	2.601.802	127.228	130.090	52.036	85.000	2.996.156	-	-	-	
23	Nusa Tenggara Timur	2.187.506	106.969	109.375	43.750	85.000	2.532.600	-	-	-	
24	Nusa Tenggara Barat	2.598.079	127.046	129.904	51.962	85.000	2.991.991	-	-	-	
25	Sulawesi Tengah	3.359.224	164.266	167.961	67.184	85.000	3.843.636	-	-	-	
26	Sulawesi Tenggara	2.993.730	146.393	149.687	59.875	85.000	3.434.684	-	-	-	
27	Kalimantan Tengah	3.595.013	175.796	179.751	71.900	85.000	4.107.460	-	-	-	
28	Banten	4.657.222	227.738	232.861	93.144	85.000	5.295.966	-	-	-	
29	Kepulauan Riau	4.500.440	220.072	225.022	90.009	85.000	5.120.542	-	-	-	
30	Bangka Belitung	3.498.479	171.076	174.924	69.970	85.000	3.999.448	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	105.603.819	5.164.027	5.280.191	2.112.076	2.550.000	120.710.113	-	-	-	

**BILL OF QUANTITY BIAYA SATUAN PENGAMANAN TAHUN 2023**

No.	Cabang	Komponen Biaya				Seragam	Total Biaya F (SUM A;E)	Manajemen Fee G (F x.% Mg Fee)	Jumlah Biaya H (F+G)	PPN 11% I (Gx11%)	Jumlah Total Perorang J (H+I)
		UMP 2023 A	BPJS Astek B (Ax4,89%)	BPJS Askes C (Ax5%)	J.Pensiun D (Ax2%)						
1	Kantor Pusat	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.569.622	-	-	-	
2	DKI Jakarta	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.569.622	-	-	-	
3	Jawa Barat	5.176.179	253.115	258.809	103.524	85.000	5.876.627	-	-	-	
4	Jawa Tengah	3.060.348	149.651	153.017	61.207	85.000	3.509.223	-	-	-	
5	Jawa Timur	4.525.479	221.296	226.274	90.510	85.000	5.148.558	-	-	-	
6	Sumatra Utara	3.624.117	177.219	181.206	72.482	85.000	4.140.025	-	-	-	
7	Bali	3.163.837	154.712	158.192	63.277	85.000	3.625.017	-	-	-	
8	Aceh	3.540.555	173.133	177.028	70.811	85.000	4.046.527	-	-	-	
9	Sumatra Barat	2.742.476	134.107	137.124	54.850	85.000	3.153.556	-	-	-	
10	Sumatra Selatan	3.541.082	173.159	177.054	70.822	85.000	4.047.117	-	-	-	
11	Sulawesi Selatan	3.523.181	172.284	176.159	70.464	85.000	4.027.087	-	-	-	
12	Sulawesi Utara	3.530.000	172.617	176.500	70.600	85.000	4.034.717	-	-	-	
13	Kalimantan Selatan	3.293.371	161.046	164.669	65.867	85.000	3.769.953	-	-	-	
14	Kalimantan Barat	3.085.615	150.887	154.281	61.712	85.000	3.537.495	-	-	-	
15	Lampung	2.991.349	146.277	149.567	59.827	85.000	3.432.020	-	-	-	
16	Riau	3.723.278	182.068	186.164	74.466	85.000	4.250.976	-	-	-	
17	DI Yogyakarta	2.324.775	113.681	116.239	46.496	85.000	2.686.191	-	-	-	
18	Maluku	2.812.827	137.547	140.641	56.257	85.000	3.232.272	-	-	-	
19	Kalimantan Timur	4.055.356	198.307	202.768	81.107	85.000	4.622.538	-	-	-	
20	Papua	3.864.696	188.984	193.235	77.294	85.000	4.409.208	-	-	-	
21	Jambi	3.230.207	157.957	161.510	64.604	85.000	3.699.279	-	-	-	
22	Bengkulu	2.601.802	127.228	130.090	52.036	85.000	2.996.156	-	-	-	
23	Nusa Tenggara Timur	2.187.506	106.969	109.375	43.750	85.000	2.532.600	-	-	-	
24	Nusa Tenggara Barat	2.598.079	127.046	129.904	51.962	85.000	2.991.991	-	-	-	
25	Sulawesi Tengah	3.359.224	164.266	167.961	67.184	85.000	3.843.636	-	-	-	
26	Sulawesi Tenggara	2.993.730	146.393	149.687	59.875	85.000	3.434.684	-	-	-	
27	Kalimantan Tengah	3.595.013	175.796	179.751	71.900	85.000	4.107.460	-	-	-	
28	Banten	4.657.222	227.738	232.861	93.144	85.000	5.295.966	-	-	-	
29	Kepulauan Riau	4.500.440	220.072	225.022	90.009	85.000	5.120.542	-	-	-	
30	Bangka Belitung	3.498.479	171.076	174.924	69.970	85.000	3.999.448	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	105.603.819	5.164.027	5.280.191	2.112.076	2.550.000	120.710.113	-	-	-	

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

**BILL OF QUANTITY BIAYA TENAGA PENJAGA MALAM TAHUN 2023**

No.	Cabang	Komponen Biaya					Total Biaya F (SUM A;E)	Manajemen Fee G (F x.%/Mg Fee)	Jumlah Biaya H (F+G)	PPN 11% I (Gx11%)	Jumlah Total Perorang J (H+I)
		UMP 2023 A	BPJS Astek B (Ax4,89%)	BPJS Askes C (Ax5%)	J.Pensiun D (Ax2%)	Seragam E					
1	Kantor Pusat	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.569.622	-	-	-	
2	DKI Jakarta	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.569.622	-	-	-	
3	Jawa Barat	5.176.179	253.115	258.809	103.524	85.000	5.876.627	-	-	-	
4	Jawa Tengah	3.060.348	149.651	153.017	61.207	85.000	3.509.223	-	-	-	
5	Jawa Timur	4.525.479	221.296	226.274	90.510	85.000	5.148.558	-	-	-	
6	Sumatra Utara	3.624.117	177.219	181.206	72.482	85.000	4.140.025	-	-	-	
7	Bali	3.163.837	154.712	158.192	63.277	85.000	3.625.017	-	-	-	
8	Aceh	3.540.555	173.133	177.028	70.811	85.000	4.046.527	-	-	-	
9	Sumatra Barat	2.742.476	134.107	137.124	54.850	85.000	3.153.556	-	-	-	
10	Sumatra Selatan	3.541.082	173.159	177.054	70.822	85.000	4.047.117	-	-	-	
11	Sulawesi Selatan	3.523.181	172.284	176.159	70.464	85.000	4.027.087	-	-	-	
12	Sulawesi Utara	3.530.000	172.617	176.500	70.600	85.000	4.034.717	-	-	-	
13	Kalimantan Selatan	3.293.371	161.046	164.669	65.867	85.000	3.769.953	-	-	-	
14	Kalimantan Barat	3.085.615	150.887	154.281	61.712	85.000	3.537.495	-	-	-	
15	Lampung	2.991.349	146.277	149.567	59.827	85.000	3.432.020	-	-	-	
16	Riau	3.723.278	182.068	186.164	74.466	85.000	4.250.976	-	-	-	
17	D I Yogyakarta	2.324.775	113.681	116.239	46.496	85.000	2.686.191	-	-	-	
18	Maluku	2.812.827	137.547	140.641	56.257	85.000	3.232.272	-	-	-	
19	Kalimantan Timur	4.055.356	198.307	202.768	81.107	85.000	4.622.538	-	-	-	
20	Papua	3.864.696	188.984	193.235	77.294	85.000	4.409.208	-	-	-	
21	Jambi	3.230.207	157.957	161.510	64.604	85.000	3.699.279	-	-	-	
22	Bengkulu	2.601.802	127.228	130.090	52.036	85.000	2.996.156	-	-	-	
23	Nusa Tenggara Timur	2.187.506	106.969	109.375	43.750	85.000	2.532.600	-	-	-	
24	Nusa Tenggara Barat	2.598.079	127.046	129.904	51.962	85.000	2.991.991	-	-	-	
25	Sulawesi Tengah	3.359.224	164.266	167.961	67.184	85.000	3.843.636	-	-	-	
26	Sulawesi Tenggara	2.993.730	146.393	149.687	59.875	85.000	3.434.684	-	-	-	
27	Kalimantan Tengah	3.595.013	175.796	179.751	71.900	85.000	4.107.460	-	-	-	
28	Banten	4.657.222	227.738	232.861	93.144	85.000	5.295.966	-	-	-	
29	Kepulauan Riau	4.500.440	220.072	225.022	90.009	85.000	5.120.542	-	-	-	
30	Bangka Belitung	3.498.479	171.076	174.924	69.970	85.000	3.999.448	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	105.603.819	5.164.027	5.280.191	2.112.076	2.550.000	120.710.113	-	-	-	

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

**BILL OF QUANTITY BIAYA TENAGA OPERATOR TELEPON TAHUN 2023**

No.	Cabang	Komponen Biaya						Total Biaya F	Manajemen Fee G	Jumlah Biaya H	PPN 11% I	Jumlah Total Perorang J
		Ump 2023	Astek	Askes	J.Pensiun	Seragam						
		A	B	C	D	E						
			(Ax4,89%)	(Ax5%)	(Ax2%)		(SUM A;E)	(F x..% Mg Fee)	(F+G)	(Gx11%)	(H+I)	
1	Kantor Pusat	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.569.622		-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>4.901.798</b>	<b>239.698</b>	<b>245.090</b>	<b>98.036</b>	<b>85.000</b>	<b>5.569.622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**BILL OF QUANTITY BIAYA TENAGA RESEPSIONIS TAHUN 2023**

No.	Cabang	Komponen Biaya						Total Biaya G	Manajemen Fee H	Jumlah Biaya I	PPN 11% J	Jumlah Total Perorang K
		UMP 2023 A	Astek B	Askes C	J.Pensiun D	Seragam E	Tunjangan F					
			(Ax4,89%)	(Ax5%)	(Ax2 %)		(SUM A;F)	(G x.%Mg Fee)	(G+H)	(Hx11%)	(I+J)	
1	Kantor Pusat	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.819.622	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	5.819.622	-	-	-	-	

**BILL OF QUANTITY BIAYA TENAGA MEKANIK TAHUN 2023**

No.	Cabang	Komponen Biaya										Total Biaya G	Manajemen Fee H (G x..% Mg Fee)	Jumlah Biaya I (G+H)	PPN 11% J (Hx11%)	Jumlah Total Perorang K (I+J)
		UIMP 2023	Astek	Askes	J.Pensiun	Seragam	Tunjangan									
		A	B (Ax4,89%)	C (Ax5%)	D (Ax2 %)	E	F									
1	Kantor Pusat	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	250.000	5.819.622	-	-	-	-	-			
2	DKI Jakarta	4.901.798	239.698	245.090	98.036	85.000	250.000	5.819.622	-	-	-	-	-			
3	Jawa Tengah	3.060.348	149.651	153.017	61.207	85.000	250.000	3.759.223	-	-	-	-	-			
4	Jawa Timur	4.525.479	221.296	226.274	90.510	85.000	250.000	5.398.558	-	-	-	-	-			
	<b>Jumlah</b>	17.389.423	850.343	869.471	347.788	340.000	1.000.000	20.797.025	-	-	-	-	-			



**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

**BILL OF QUANTITY BIAYA TUNJANGAN HARI RAYA TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

No.	Cabang	Anggaran Pemeliharaan				
		UMP Per Orang Per Tahun	Mgt.Fee...%	Total Biaya Per Orang Per Tahun	PPN 11%	Total Biaya Per Orang Per Tahun (Include PPN)
		A	B (A x...% Mgt Fee)	C (A+B)	D (Bx11%)	E (C+D)
1	Kantor Pusat	4.901.798	-	-	-	-
2	DKI Jakarta	4.901.798	-	-	-	-
3	Jawa Barat	5.176.179	-	-	-	-
4	Jawa Tengah	3.060.348	-	-	-	-
5	Jawa Timur	4.525.479	-	-	-	-
6	Sumatra Utara	3.624.117	-	-	-	-
7	Bali	3.163.837	-	-	-	-
8	Aceh	3.540.555	-	-	-	-
9	Sumatra Barat	2.742.476	-	-	-	-
10	Sumatra Selatan	3.541.082	-	-	-	-
11	Sulawesi Selatan	3.523.181	-	-	-	-
12	Sulawesi Utara	3.530.000	-	-	-	-
13	Kalimantan Selatan	3.293.371	-	-	-	-
14	Kalimantan Barat	3.085.615	-	-	-	-
15	Lampung	2.991.349	-	-	-	-
16	Riau	3.723.278	-	-	-	-
17	DI Yogyakarta	2.324.775	-	-	-	-
18	Maluku	2.812.827	-	-	-	-
19	Kalimantan Timur	4.055.356	-	-	-	-
20	Papua	3.864.696	-	-	-	-
21	Jambi	3.230.207	-	-	-	-
22	Bengkulu	2.601.802	-	-	-	-
23	Nusa Tenggara Timur	2.187.506	-	-	-	-
24	Nusa Tenggara Barat	2.598.079	-	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	3.359.224	-	-	-	-
26	Sulawesi Tenggara	2.993.730	-	-	-	-
27	Kalimantan Tengah	3.595.013	-	-	-	-
28	Banten	4.657.222	-	-	-	-
29	Kepulauan Riau	4.500.440	-	-	-	-
30	Bangka Belitung	3.498.479	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>105.603.819</b>				

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

No.	Cabang	Anggaran Transportasi				
		UMP Per Orang Per Tahun	Mgt.Fee...%	Total Biaya Per Orang Per Tahun	PPN 11%	Total Biaya Per Orang Per Tahun (Include PPN)
		A	B (A x...% Mg Fee)	C (A+B)	D (Bx11%)	E (C+D)
1	Kantor Pusat	4.901.798	-	-	-	-
2	DKI Jakarta	4.901.798	-	-	-	-
3	Jawa Barat	5.176.179	-	-	-	-
4	Jawa Tengah	3.060.348	-	-	-	-
5	Jawa Timur	4.525.479	-	-	-	-
6	Sumatra Utara	3.624.117	-	-	-	-
7	Bali	3.163.837	-	-	-	-
8	Aceh	3.540.555	-	-	-	-
9	Sumatra Barat	2.742.476	-	-	-	-
10	Sumatra Selatan	3.541.082	-	-	-	-
11	Sulawesi Selatan	3.523.181	-	-	-	-
12	Sulawesi Utara	3.530.000	-	-	-	-
13	Kalimantan Selatan	3.293.371	-	-	-	-
14	Kalimantan Barat	3.085.615	-	-	-	-
15	Lampung	2.991.349	-	-	-	-
16	Riau	3.723.278	-	-	-	-
17	DI Yogyakarta	2.324.775	-	-	-	-
18	Maluku	2.812.827	-	-	-	-
19	Kalimantan Timur	4.055.356	-	-	-	-
20	Papua	3.864.696	-	-	-	-
21	Jambi	3.230.207	-	-	-	-
22	Bengkulu	2.601.802	-	-	-	-
23	Nusa Tenggara Timur	2.187.506	-	-	-	-
24	Nusa Tenggara Barat	2.598.079	-	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	3.359.224	-	-	-	-
26	Sulawesi Tenggara	2.993.730	-	-	-	-
27	Kalimantan Tengah	3.595.013	-	-	-	-
28	Banten	4.657.222	-	-	-	-
29	Kepulauan Riau	4.500.440	-	-	-	-
30	Bangka Belitung	3.498.479	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>105.603.819</b>				

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

No.	Cabang	Anggaran Keamanan				
		UMP Per Orang Per Tahun	Mgt.Fee...%	Total Biaya Per Orang Per Tahun	PPN 11%	Total Biaya Per Orang Per Tahun (Include PPN)
		A	B (A x...% Mg Fee)	C (A+B)	D (Bx11%)	E (C+D)
1	Kantor Pusat	4.901.798	-	-	-	-
2	DKI Jakarta	4.901.798	-	-	-	-
3	Jawa Barat	5.176.179	-	-	-	-
4	Jawa Tengah	3.060.348	-	-	-	-
5	Jawa Timur	4.525.479	-	-	-	-
6	Sumatra Utara	3.624.117	-	-	-	-
7	Bali	3.163.837	-	-	-	-
8	Aceh	3.540.555	-	-	-	-
9	Sumatra Barat	2.742.476	-	-	-	-
10	Sumatra Selatan	3.541.082	-	-	-	-
11	Sulawesi Selatan	3.523.181	-	-	-	-
12	Sulawesi Utara	3.530.000	-	-	-	-
13	Kalimantan Selatan	3.293.371	-	-	-	-
14	Kalimantan Barat	3.085.615	-	-	-	-
15	Lampung	2.991.349	-	-	-	-
16	Riau	3.723.278	-	-	-	-
17	DI Yogyakarta	2.324.775	-	-	-	-
18	Maluku	2.812.827	-	-	-	-
19	Kalimantan Timur	4.055.356	-	-	-	-
20	Papua	3.864.696	-	-	-	-
21	Jambi	3.230.207	-	-	-	-
22	Bengkulu	2.601.802	-	-	-	-
23	Nusa Tenggara Timur	2.187.506	-	-	-	-
24	Nusa Tenggara Barat	2.598.079	-	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	3.359.224	-	-	-	-
26	Sulawesi Tenggara	2.993.730	-	-	-	-
27	Kalimantan Tengah	3.595.013	-	-	-	-
28	Banten	4.657.222	-	-	-	-
29	Kepulauan Riau	4.500.440	-	-	-	-
30	Bangka Belitung	3.498.479	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>105.603.819</b>				

**BILL OF QUANTITY BIAYA KOMPENSASI TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

No.	Cabang	Anggaran Pemeliharaan				
		UIMP Per Orang Per Tahun	Mgt.Fee...%	Total Biaya Per Orang Per Tahun	PPN 11%	Total Biaya Per Orang Per Tahun (Include PPN)
		A	B (A x...% Mgt Fee)	C (A+B)	D (Bx11%)	E (C+D)
1	Kantor Pusat	4.901.798	-	-	-	-
2	DKI Jakarta	4.901.798	-	-	-	-
3	Jawa Barat	5.176.179	-	-	-	-
4	Jawa Tengah	3.060.348	-	-	-	-
5	Jawa Timur	4.525.479	-	-	-	-
6	Sumatra Utara	3.624.117	-	-	-	-
7	Bali	3.163.837	-	-	-	-
8	Aceh	3.540.555	-	-	-	-
9	Sumatra Barat	2.742.476	-	-	-	-
10	Sumatra Selatan	3.541.082	-	-	-	-
11	Sulawesi Selatan	3.523.181	-	-	-	-
12	Sulawesi Utara	3.530.000	-	-	-	-
13	Kalimantan Selatan	3.293.371	-	-	-	-
14	Kalimantan Barat	3.085.615	-	-	-	-
15	Lampung	2.991.349	-	-	-	-
16	Riau	3.723.278	-	-	-	-
17	DI Yogyakarta	2.324.775	-	-	-	-
18	Maluku	2.812.827	-	-	-	-
19	Kalimantan Timur	4.055.356	-	-	-	-
20	Papua	3.864.696	-	-	-	-
21	Jambi	3.230.207	-	-	-	-
22	Bengkulu	2.601.802	-	-	-	-
23	Nusa Tenggara Timur	2.187.506	-	-	-	-
24	Nusa Tenggara Barat	2.598.079	-	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	3.359.224	-	-	-	-
26	Sulawesi Tenggara	2.993.730	-	-	-	-
27	Kalimantan Tengah	3.595.013	-	-	-	-
28	Banten	4.657.222	-	-	-	-
29	Kepulauan Riau	4.500.440	-	-	-	-
30	Bangka Belitung	3.498.479	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>105.603.819</b>				

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

No.	Cabang	Anggaran Transportasi				
		UMP Per Orang Per Tahun	Mgt.Fee...%	Total Biaya Per Orang Per Tahun	PPN 11%	Total Biaya Per Orang Per Tahun (Include PPN)
		A	B (A x...% Mgt Fee)	C (A+B)	D (Bx11%)	E (C+D)
1	Kantor Pusat	4.901.798	-	-	-	-
2	DKI Jakarta	4.901.798	-	-	-	-
3	Jawa Barat	5.176.179	-	-	-	-
4	Jawa Tengah	3.060.348	-	-	-	-
5	Jawa Timur	4.525.479	-	-	-	-
6	Sumatra Utara	3.624.117	-	-	-	-
7	Bali	3.163.837	-	-	-	-
8	Aceh	3.540.555	-	-	-	-
9	Sumatra Barat	2.742.476	-	-	-	-
10	Sumatra Selatan	3.541.082	-	-	-	-
11	Sulawesi Selatan	3.523.181	-	-	-	-
12	Sulawesi Utara	3.530.000	-	-	-	-
13	Kalimantan Selatan	3.293.371	-	-	-	-
14	Kalimantan Barat	3.085.615	-	-	-	-
15	Lampung	2.991.349	-	-	-	-
16	Riau	3.723.278	-	-	-	-
17	DI Yogyakarta	2.324.775	-	-	-	-
18	Maluku	2.812.827	-	-	-	-
19	Kalimantan Timur	4.055.356	-	-	-	-
20	Papua	3.864.696	-	-	-	-
21	Jambi	3.230.207	-	-	-	-
22	Bengkulu	2.601.802	-	-	-	-
23	Nusa Tenggara Timur	2.187.506	-	-	-	-
24	Nusa Tenggara Barat	2.598.079	-	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	3.359.224	-	-	-	-
26	Sulawesi Tenggara	2.993.730	-	-	-	-
27	Kalimantan Tengah	3.595.013	-	-	-	-
28	Banten	4.657.222	-	-	-	-
29	Kepulauan Riau	4.500.440	-	-	-	-
30	Bangka Belitung	3.498.479	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>105.603.819</b>				

**RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)  
PENGADAAN TENAGA PENUNJANG TAHUN 2023**

No.	Cabang	Anggaran Keamanan				
		UMP Per Orang Per Tahun	Mgt.Fee...%	Total Biaya Per Orang Per Tahun	PPN 11%	Total Biaya Per Orang Per Tahun (Include PPN)
		A	B (A x...% Mg Fee)	C (A+B)	D (Bx11%)	E (C+D)
1	Kantor Pusat	4.901.798	-	-	-	-
2	DKI Jakarta	4.901.798	-	-	-	-
3	Jawa Barat	5.176.179	-	-	-	-
4	Jawa Tengah	3.060.348	-	-	-	-
5	Jawa Timur	4.525.479	-	-	-	-
6	Sumatra Utara	3.624.117	-	-	-	-
7	Bali	3.163.837	-	-	-	-
8	Aceh	3.540.555	-	-	-	-
9	Sumatra Barat	2.742.476	-	-	-	-
10	Sumatra Selatan	3.541.082	-	-	-	-
11	Sulawesi Selatan	3.523.181	-	-	-	-
12	Sulawesi Utara	3.530.000	-	-	-	-
13	Kalimantan Selatan	3.293.371	-	-	-	-
14	Kalimantan Barat	3.085.615	-	-	-	-
15	Lampung	2.991.349	-	-	-	-
16	Riau	3.723.278	-	-	-	-
17	DI Yogyakarta	2.324.775	-	-	-	-
18	Maluku	2.812.827	-	-	-	-
19	Kalimantan Timur	4.055.356	-	-	-	-
20	Papua	3.864.696	-	-	-	-
21	Jambi	3.230.207	-	-	-	-
22	Bengkulu	2.601.802	-	-	-	-
23	Nusa Tenggara Timur	2.187.506	-	-	-	-
24	Nusa Tenggara Barat	2.598.079	-	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	3.359.224	-	-	-	-
26	Sulawesi Tenggara	2.993.730	-	-	-	-
27	Kalimantan Tengah	3.595.013	-	-	-	-
28	Banten	4.657.222	-	-	-	-
29	Kepulauan Riau	4.500.440	-	-	-	-
30	Bangka Belitung	3.498.479	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>105.603.819</b>				

**BILL OF QUANTITY BIAYA UANG MAKAN PER HARI**

No.	Uang Makan / Hari	Manajemen Fee	Jumlah Biaya	PPN 11%	Jumlah Total
	A	B	C	D	E
	(A x..% Mg Fee)	(A+B)	(Bx11%)	(C+D)	
1	13.158	-	-	-	-

**PAKTA INTEGRITAS**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :  
No. Identitas :  
Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan, berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan :

Perusahaan :  
Alamat Kedudukan :

Dalam rangka Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek tidak sehat dan praktek Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Jasa Raharja atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan prosedur atau ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, kompetitif, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, dituntut secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

....., 2023  
Nama Perusahaan

(materai 10000)

N a m a  
Jabatan



**Formulir Isian Kualifikasi**

**Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Bertindak untuk dan : .....  
atas nama

Alamat : .....

Telepon / Fax : .....

E-mail : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat .....(sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas no. akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya);
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Data-data saya / perusahaan saya adalah sebagai berikut :

**A. Data Administrasi**

**1. Umum**

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan/ Kemitraan	:		
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang	
3. Alamat	:		
No. Telepon	:		
No. Fax	:		
E-mail	:		
4. Alamat kantor Pusat	:	( diisi dalam hal yang menawarkan cabang perusahaan/ bukan perusahaan pusatnya)	
No. Telepon	:		
No. Fax	:		
E-mail	:		

**B. Ijin Usaha**

No. SIUP	:	.....Tanggal.....
Masa berlaku ijin usaha	:	.....
Instansi pemberi ijin usaha	:	.....

No. SITU/Ket. Domisili	:	.....Tanggal.....
Masa berlaku	:	.....
Instansi pemberi ijin	:	.....

No. TDP	:	.....Tanggal.....
Masa berlaku	:	.....
Instansi yang menerbitkan	:	.....

**C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan**

<b>1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi</b> a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris :
<b>2. Akta Perubahan Terakhir</b> a. Nomor Akta : b. Tanggal : c. Nama Notaris :

**D. Pengurus**

**1. Komisaris (Untuk PT)**

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

**2. Direksi / Penanggung Jawab / Pengurus Perusahaan**

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

**E. Data Keuangan**

**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/ Susunan Persero (untuk CV / Firma)**  
(jika orang perorangan maka cukup diberi tanda " – ")

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase

**2. Pajak**

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun : terakhir Nomor/Tanggal 3. Lap. bulanan PPH/PPN tiga : bln terakhir No/tanggal
---

**3. Neraca Perusahaan terakhir**

**Aktiva  
Pasiva**

	Jumlah	Rp.....		Jumlah	Rp.....

\* Piutang jangka pendek (sampai dengan 6 bulan) : Rp. ....  
 Piutang jangka panjang (lebih dari 6 bulan) : Rp. ....  
 Jumlah : Rp. ....

**Data Pengalaman Perusahaan**

No.	Nama Pekerjaan	Bidang /sub bidang	Lokasi	PT Jasa Raharja		Nilai kontrak		Waktu pelaksanaan	
				Nama	Alamat /telp	No./ tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2023

**PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Perorangan**

Materai 10000  
(Tanda tangan & stempel)

**Nama Penanggung jawab  
Jabatan**

**SURAT PENYATAAN  
TIDAK PAILIT & TIDAK DALAM PENGAWASAN HUKUM**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :  
Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan, berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan :

Perusahaan :  
Alamat :

Dalam rangka Tenaga Penunjang Tahun 2023, dengan ini menyatakan bahwa **Perusahaan kami Tidak Sedang Pailit, Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Sedang Dihentikan & Direksi berwenang Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.**

Surat pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

....., 2023  
Nama Perusahaan

(materai 10000)

N a m a  
Jabatan

**SURAT PENYATAAN  
KEBENARAN DATA PERUSAHAAN**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :  
Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan, berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan :

Perusahaan :  
Alamat :

Dalam rangka Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023, dengan ini menyatakan **bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.**

Surat pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan Tenaga Penunjang Tahun 2023.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

....., 2023  
Nama Perusahaan

(materai 10000)

N a m a  
Jabatan